

PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

PERATURAN DIREKSI PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

NOMOR : 004.K/020/DIR-PLNNR/II/2024

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP *GOVERNANCE*,
RISK MANAGEMENT DAN *COMPLIANCE* (GRC) DI LINGKUNGAN PT PLN
NUSANTARA RENEWABLES

DIREKSI PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

- Menimbang :
- a. bahwa PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) telah mengesahkan Peraturan Direksi PLN NR No. 013.K/020/DIR-PJBI/XII/2021 tentang Penerapan *Governance*, *Risk Management and Compliance* (GRC) di Lingkungan PLN NR tanggal 20 Desember 2021.
 - b. bahwa telah terjadi pembaharuan struktur organisasi PLN NR sesuai dengan Keputusan Direksi PLN NR No. 002.K/020/DIR-PJBI/III/2022 tentang Penetapan Bagan Struktur Organisasi (BSO) dan Bagan Susunan Jabatan (BSJ) PLN NR tanggal 14 Maret 2022.
 - c. bahwa telah ditetapkannya batasan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris yang disahkan dalam Keputusan Bersama Direksi – Dewan Komisaris PLN NR No. 001.K/021/SKB-DIR/II/2024 dan No.001.K/021/SKB-DKM/II/2024 tentang Penetapan Batasan Kewenangan Direksi – Dewan Komisaris PLN NR tanggal 16 Februari 2024.
 - d. Dengan adanya pembaharuan sebagaimana butir b dan c di atas, maka diperlukan penyesuaian atas pedoman GRC PLN NR melalui pencabutan atas Peraturan Direksi tentang GRC tahun 2021 dan perlu ditetapkan kembali Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Renewables tentang Penetapan Prinsip *Governance*, *Risk Management* dan *Compliance* (GRC) Di Lingkungan PT PLN Nusantara Renewables.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Renewables beserta perubahannya.
 2. Peraturan Direksi PLN NR No. 013.K/020/DIR-PLNNR/XII/2021 tentang Penerapan *Governance*, *Risk Management and Compliance* (GRC) Di Lingkungan PLN NR tanggal 20 Desember 2021.
 3. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PLN NR No. Direksi 001.K/020/DIR-PLNNR/II/020 dan No. Dewan Komisaris 001.K/020/DK-PLNNR/II/2020 tentang Penetapan

Pelimpahan Pagu Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris PLN NR.

4. Keputusan Direksi PLN NR No. 002.K/020/DIR-PLNNR/III/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan PLN NR.
5. Keputusan Direksi PLN NR No. 002.K/020/DIR-PLNNR/III/2022 tentang Penetapan Bagan Struktur Organisasi (BSO) dan Bagan Struktur Jabatan (BSJ) PLN NR tanggal 14 Maret 2022.
6. Keputusan Direksi PLN NR No. 002.P/020/DIR-PLNNR/X/2019 tentang Implementasi PJBI-IMS tanggal 28 Oktober 2019.
7. Peraturan Direksi PLN NR No. 004.K/020/DIR-PLNNR/XI/2019 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal tanggal 22 November 2019.
8. Kesepakatan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PLN NR No. 005.K/021/SKB-DIR/VIII/2022 dan No. 002.K/021/SKB-DKM/VIII/2022 tentang Tata Laksana Kerja Direksi – Dewan Komisaris PLN NR tanggal 05 Agustus 2022.
9. Peraturan Direksi PLN NR No. 010.K/020/DIR-PLNNR/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Proyek dan Strategic Partner dalam Pengembangan Bisnis tanggal 21 Desember 2022.
10. Keputusan Direksi PLN NR No. 013.K/020/DIR-PLN-NR/XI/2023 tentang Perubahan Terhadap Surat Keputusan Direksi PT PLN NR No. 001.K/020/DIR-PLNNR/IV/2020 tentang Penetapan Susunan Personil atas Proses Pengadaan Barang/Jasa tanggal 22 November 2023.

Memperhatikan : Akta Lenny Janis Nomor 22 tanggal 18 Desember 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Devi Yunanda, S.H., M.Kn. Nomor 01 tanggal 04 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN NUSANTARA RENEWABLES TENTANG PENERAPAN PRINSIP *GOVERNANCE*, *RISK MANAGEMENT* DAN *COMPLIANCE* (GRC) DI LINGKUNGAN PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Aksi Korporasi** adalah kegiatan / proyek / inisiatif / rancangan keputusan Perusahaan yang mana dalam pelaksanaannya membutuhkan persetujuan organ Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
- (2) **Anak Perusahaan** adalah Perusahaan Afiliasi yang sebagian besar sahamnya (lebih dari 50%) dimiliki oleh Perusahaan atau yang dikendalikan oleh Perusahaan.
- (3) **Analisis Risiko** adalah suatu dokumen yang disiapkan oleh Pemrakarsa yang sekurang-kurangnya berisikan identifikasi risiko, evaluasi risiko dan informasi pendukung lainnya yang membahas atas aspek-aspek yang berpengaruh terhadap suatu usulan Aksi Korporasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atas Aksi Korporasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan dalam rangka implementasi GRC.
- (4) **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Renewables.
- (5) **Direksi** adalah Direksi PT PLN Nusantara Renewables.
- (6) **Direktur Utama** adalah nomenklatur jabatan yang diberikan kepada salah seorang direktur sebagai koordinator dari Direksi.
- (7) **Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan (DMRK)** adalah suatu dokumen yang disiapkan oleh Pemrakarsa yang membahas secara komprehensif atas aspek-aspek yang berpengaruh terhadap suatu usulan Aksi Korporasi dengan sekurang-kurangnya berisikan Kajian Hukum, Kajian Finansial, Kajian Kepatuhan, Kajian Lingkungan, Kajian Operasi dan tahapan Manajemen Risiko sebagai dasar dalam persetujuan atas Aksi Korporasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan dalam rangka implementasi GRC.
- (8) **Tata Kelola Perusahaan yang Baik** atau *Good Corporate Governance* yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha.
- (9) **Tata Kelola** atau *Governance* adalah kombinasi proses dan struktur yang mengatur hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, termasuk hubungan Perusahaan dengan para pemangku kepentingan.
- (10) **Governance, Risk Management and Compliance** yang selanjutnya disebut GRC, adalah kumpulan kapasitas terintegrasi yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai sasaran secara andal, mengantisipasi ketidakpastian dan bertindak dengan integritas.
- (11) **Kajian Risiko** adalah suatu dokumen yang disiapkan oleh Pemrakarsa yang sekurang-kurangnya berisikan tahapan Manajemen Risiko atas aspek-aspek yang berpengaruh terhadap suatu usulan Aksi Korporasi sebagai dasar dalam persetujuan atas Aksi Korporasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan dalam rangka implementasi GRC.

- (12) **Kepala Satuan Manajemen Risiko, Pengawasan Internal dan Kinerja** yang selanjutnya disebut KSMRPIK adalah karyawan Perusahaan yang diangkat oleh Direksi untuk memimpin satuan manajemen risiko, pengawasan internal dan kinerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko, pengawasan internal dan manajemen kinerja.
- (13) **Kepatuhan atau Compliance** adalah kepatuhan atas pelaksanaan undang-undang, aturan, kebijakan, proses bisnis dan prosedur yang berlaku di Perusahaan dengan mengedepankan prinsip integritas.
- (14) **Keputusan Direksi** adalah suatu tindakan Perusahaan yang diputuskan oleh Direksi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku di Perusahaan baik pada Rapat Direksi atau Sirkuler.
- (15) **Lembar Dasar Keputusan** adalah lembar yang disiapkan oleh Pemrakarsa yang berisikan daftar pemenuhan atas dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengambilan Keputusan Direksi.
- (16) **Lembar Ulasan Aksi Korporasi** adalah lembar yang disiapkan oleh Pemrakarsa untuk selanjutnya diisi oleh Pengulas dengan ringkasan ulasan atas Aksi Korporasi yang diusulkan sebagai bukti evaluasi.
- (17) **Manajemen Risiko** adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan mencakup sistem pengawasan internal dan tata kelola terintegrasi.
- (18) **Manajer Hukum** adalah karyawan Perusahaan yang diangkat untuk memimpin bidang hukum di Perusahaan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Perusahaan.
- (19) **Matriks GRC** adalah pemetaan kewenangan pengambilan keputusan dan ketentuan jenis dokumen Aksi Korporasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan Perusahaan.
- (20) **Organ Perusahaan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.
- (21) **Pemrakarsa** adalah satuan / bidang di Perusahaan yang mengusulkan Aksi Korporasi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
- (22) **Pengulas** adalah satuan / bidang di Perusahaan yang memiliki wewenang dalam mengulas usulan Aksi Korporasi.
- (23) **Perusahaan** adalah PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR).
- (24) **Perusahaan Afiliasi** adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Perusahaan.
- (25) **Rapat Direksi** adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi.
- (26) **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disebut sebagai RUPS adalah Organ Perusahaan dengan kewenangan tertinggi.
- (27) **Sekretaris Perusahaan** adalah karyawan Perusahaan yang diangkat oleh Direksi untuk memimpin satuan sekretariat perusahaan yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.
- (28) **Sirkuler** adalah pengambilan keputusan di luar rapat atau tanpa mengadakan rapat secara fisik sesuai dengan kewenangan yang diatur pada anggaran dasar Perusahaan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Direksi ini adalah sebagai pembaruan acuan implementasi GRC di lingkungan Perusahaan agar sejalan dengan pembaruan peraturan lain yang berpengaruh terhadap peraturan ini.
- (2) Tujuan dari peraturan Direksi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas operasional Perusahaan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan Perusahaan yang memenuhi kaidah GCG.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penerapan GRC dalam Peraturan Direksi ini meliputi:

- a. Aspek GRC
- b. Lingkup GRC
- c. Tugas dan kewenangan
- d. Jenis Peran GRC
- e. Tingkat GRC
- f. Mekanisme implementasi GRC

BAB II

PENERAPAN GRC

Pasal 4

Aspek GRC

Aspek-aspek GRC merupakan kesatuan prinsip yang tidak terpisahkan untuk memastikan setiap Aksi Korporasi dapat terlaksana sesuai sasaran secara andal, siap dalam mengatasi ketidakpastian dan berintegritas, yang terdiri dari:

- a. Tata Kelola / *Governance*, meliputi namun tidak terbatas pada:
 1. Anggaran dasar Perusahaan;
 2. Batasan kewenangan Direksi – Dewan Komisaris;
 3. Tata laksana kerja Direksi dan Direksi-Dewan Komisaris.
- b. Manajemen Risiko / *Risk Management*, meliputi namun tidak terbatas pada penerapan Manajemen Risiko terintegrasi Perusahaan.
- c. Kepatuhan / *Compliance*, meliputi namun tidak terbatas pada:
 1. Manajemen kepatuhan;
 2. Kebijakan pengaduan (*whistleblowing*);
 3. Pengawasan internal.

Pasal 5

Lingkup GRC

- (1) Lingkup penerapan GRC di lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. Aksi Korporasi terkait dengan pengembangan proyek, yang terdiri atas:
 1. Aksi Korporasi pada tahap inisiasi proyek;
 2. Aksi Korporasi pada tahap pengembangan proyek.
- (2) Aksi Korporasi terkait dengan pengelolaan portofolio proyek, yang terdiri atas:
 - a. Persetujuan RUPS Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
 - b. Aksi Korporasi terkait dengan organisasi pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi di bawah Perusahaan;
 - c. Aksi Korporasi terkait dengan pengelolaan investasi Perusahaan.
- (3) Aksi Korporasi terkait operasional Perusahaan, yang terdiri atas:
 - a. Pengelolaan Perusahaan;
 - b. Pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan anggaran;
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia;
 - e. Pengadaan.
- (4) Aksi Korporasi lainnya, dengan batasan:
 - a. Bersifat strategis / signifikan mempengaruhi operasional Perusahaan;
 - b. Di luar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - c. Bersifat mendesak dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap Perusahaan;
 - d. Menyangkut karyawan dalam jabatan strategis;
 - e. Memiliki dampak kinerja dan dampak operasional lintas bidang di Perusahaan;
 - f. Menyangkut tindakan Direksi selaku pemegang saham di Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.
- (5) Lingkup penerapan GRC secara detail tercantum pada lampiran I Peraturan Direksi ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

Pasal 6

Tugas dan Kewenangan

- (1) Direktur Utama bertindak sebagai pengarah yang memberikan komitmen, arahan dan strategi atas penerapan GRC di Perusahaan.
- (2) Direktur yang membawahi Direktorat Keuangan bertindak sebagai koordinator aktivitas GRC dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memastikan Perusahaan menjalankan GCG dengan koordinator Sekretaris Perusahaan;
 - b. Memastikan berjalannya pengelolaan kepatuhan dan risiko Perusahaan, pencegahan potensi *fraud* pada proses bisnis, maupun kebijakan / regulasi serta situasi konflik kepentingan yang menyebabkan terjadinya tindakan ilegal, tidak etis atau tidak patut dengan koordinator KSMRPIK;
 - c. Memastikan hamornisasi atas kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan koordinator Manajer Hukum;
 - d. Memastikan sistem manajemen terintegrasi (*Integrated Management System / IMS*) sudah dijalankan dan mengacu pada praktik bisnis dengan koordinator KSMRPIK.

- e. Memastikan berjalannya pengawasan internal Perusahaan secara efisien dan efektif dengan koordinator KSMRPIK.
- (3) Seluruh Karyawan Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan implementasi GRC dalam setiap usulan Aksi Korporasi dari satuan / bidangnya.

Pasal 7

Jenis Peran GRC

- (1) Pada implementasi GRC dibagi menjadi 2 (dua) peran sebagai berikut:
- a. Pemrakarsa;
 - b. Pengulas, yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - 1. Pengulas Tetap, adalah satuan / bidang di Perusahaan yang bertugas sebagai Pengulas untuk setiap Aksi Korporasi yang diusulkan yaitu KSMRPIK, Sekretaris Perusahaan dan Manajer Hukum.
 - 2. Pengulas Tambahan, adalah bidang di Perusahaan yang bertugas sebagai Pengulas untuk setiap Aksi Korporasi yang terkait dengan bidangnya sesuai dengan permintaan Pemrakarsa atau ditunjuk oleh Pengulas Tetap (jika diperlukan).
- (2) Tugas Pemrakarsa adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun dokumen Lembar Dasar Keputusan / Analisis Risiko / Kajian Risiko / DMRK sesuai dengan jenis usulan Aksi Korporasi dengan berisikan informasi yang relevan dan sesuai dengan Matriks GRC pada peraturan Direksi ini;
 - b. Menyampaikan data dan informasi secara lengkap dan bertanggung jawab terhadap keabsahan, kebenaran dan keakuratan data serta informasi yang disampaikan dalam usulan;
 - c. Menyampaikan dan memastikan bahwa dokumen Lembar Dasar Keputusan / Analisis Risiko / Kajian Risiko / DMRK telah diperiksa oleh Pengulas;
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dokumen Lembar Dasar Keputusan / Analisis Risiko / Kajian Risiko / DMRK dari Pengulas.
 - e. Menindaklanjuti dokumen Lembar Dasar Keputusan / Analisis Risiko / Kajian Risiko / DMRK sebagai Aksi Korporasi sesuai dengan peraturan yang berlaku hingga terbit keputusan.
- (3) Tugas Pengulas adalah sebagai berikut:
- a. Mengevaluasi dan memeriksa seluruh data dan informasi yang disampaikan oleh Pemrakarsa;
 - b. Memberikan ulasan dan rekomendasi perbaikan terhadap dokumen Lembar Dasar Keputusan / Analisis Risiko / Kajian Risiko / DMRK yang disusun oleh Pemrakarsa.
 - c. Memastikan bahwa dokumen Lembar Dasar Keputusan / Analisis Risiko / Kajian Risiko / DMRK yang disusun oleh Pemrakarsa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memenuhi ketentuan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 8

Tingkat GRC

- (1) Pada Matriks GRC terdapat penentuan tingkat *Governance*, *Risk* dan *Compliance* yang berpengaruh terhadap penentuan tingkat GRC pada setiap Aksi Korporasi yang telah dipetakan.
- (2) Untuk Aksi Korporasi yang belum dipetakan di Matriks GRC, maka tingkat GRC akan diputuskan oleh Pengulas Tetap dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Direksi.
- (3) Tingkat *Governance* mengacu pada dasar peraturan yang menjadi acuan atas pelaksanaan Aksi Korporasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diatur di anggaran dasar Perusahaan, maka tingkat *Governance* adalah tinggi;
 - b. Diatur di peraturan bersama/keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, maka tingkat *Governance* adalah moderat;
 - c. Diatur di peraturan/keputusan Direksi Perusahaan, maka tingkat *Governance* adalah rendah.
- (4) Tingkat *Risk* mengacu pada peraturan Direksi tentang Manajemen Risiko yang berlaku di Perusahaan yang mana tingkat Risiko terbagi menjadi 5 (lima) jenis sebagai berikut:
 - a. Rendah;
 - b. Moderat;
 - c. Tinggi;
 - d. Sangat tinggi;
 - e. Ekstrem.
- (5) Tingkat *Compliance* mengacu pada pengambil keputusan beserta objek Aksi Korporasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengambil keputusan adalah RUPS, maka tingkat *compliance* adalah sangat tinggi;
 - b. Pengambil keputusan adalah RUPS dengan objek keputusan adalah perihal tenaga kerja / SDM, maka tingkat *compliance* adalah rendah;
 - c. Pengambil keputusan adalah Keputusan Dewan Komisaris, maka tingkat *compliance* adalah tinggi;
 - d. Pengambil keputusan adalah Keputusan Direksi dengan atau tanpa penyampaian laporan kepada Dewan Komisaris, maka tingkat *compliance* adalah moderat;
 - e. Pengambil keputusan adalah Keputusan Direksi terkait, maka tingkat *compliance* adalah rendah.
- (6) Dari setiap tingkat *Governance*, *Risk* dan *Compliance* akan dilakukan pembobotan yang menghasilkan tingkat GRC dengan syarat dokumen untuk pengambilan keputusan sebagai berikut:
 - a. Tingkat 4: Sangat Tinggi, maka syarat dokumen pengambilan keputusan adalah DMRK dengan mengikuti kerangka dokumen pada lampiran III Peraturan Direksi ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini;

- b. Tingkat 3: Tinggi, maka syarat dokumen pengambilan keputusan adalah Kajian Risiko dengan mengikuti kerangka dokumen pada lampiran IV Peraturan Direksi ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini;
- c. Tingkat 2: Moderat, maka syarat dokumen pengambilan keputusan adalah Analisis Risiko dengan mengikuti lampiran V Peraturan Direksi ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini;
- d. Tingkat 1: Rendah, maka syarat dokumen pengambilan keputusan adalah Lembar Dasar Keputusan lampiran VI Peraturan Direksi ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

Pasal 9

Mekanisme Implementasi GRC

- (1) Pemrakarsa menyampaikan permohonan ulasan atas usulan Aksi Korporasi berupa Lembar Dasar Keputusan / Analisis Risiko / Kajian Risiko / DMRK sesuai dengan kerangka dokumen yang ada pada lampiran III, IV, V dan VI peraturan ini, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung melalui nota dinas kepada Pengulas.
- (2) Usulan Aksi Korporasi yang bersifat mendesak tetap harus melalui mekanisme GRC dengan menyampaikan target terbitnya keputusan dan menjadi prioritas pembahasan dalam Rapat Direksi.
- (3) Pengulas memeriksa kelengkapan dokumen Aksi Korporasi dan menyampaikan kekurangan kelengkapan dokumen Aksi Korporasi kepada Pemrakarsa apabila terdapat kekurangan.
- (4) Pengulas memberikan ulasan atas usulan Aksi Korporasi dan mengisi serta menandatangani Lembar Ulasan Aksi Korporasi.
- (5) Pengulas dapat mengundang Pemrakarsa untuk menjelaskan Aksi Korporasi yang diusulkan apabila dibutuhkan.
- (6) Pengulas menuliskan ringkasan ulasan atas usulan Aksi Korporasi pada Lembar Ulasan Aksi Korporasi serta menandatangani sebagai dasar bahwa Aksi Korporasi tersebut dapat ditindaklanjuti.
- (7) Apabila Aksi Korporasi telah selesai diulas dan disetujui untuk ditindaklanjuti, maka dapat ditindaklanjuti dengan mengacu pada Matriks GRC sebagai berikut:
 - a. Apabila Aksi Korporasi dapat disetujui oleh Direktur terkait, maka Pemrakarsa dapat mengusulkan rancangan keputusan direktur untuk selanjutnya diperiksa oleh Pengulas Tetap sebelum diajukan kepada Direktur terkait untuk ditandatangani.
 - b. Apabila Aksi Korporasi harus disetujui oleh Direksi, maka Pemrakarsa dapat mengusulkan agenda Rapat Direksi untuk usulan persetujuan Aksi Korporasi oleh Direksi kepada Sekretaris Perusahaan.
- (8) Untuk Aksi Korporasi yang bersifat strategis dan tidak memungkinkan masuk dalam agenda Rapat Direksi dikarenakan keterbatasan waktu atau suatu hal lain, maka Keputusan Rapat Direksi dapat dilakukan secara Sirkuler setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi untuk pengambilan keputusan Sirkuler dan dilaksanakan penjelasan dari Pemrakarsa kepada masing-masing Direksi.

- (9) Untuk pengajuan Keputusan Direksi atas Aksi Korporasi, Pemrakarsa diwajibkan menyiapkan dokumen pendukung pengambilan Keputusan Direksi sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Lembar Dasar Keputusan / Analisis Risiko / Kajian Risiko / DMRK, sesuai dengan ketentuan pada Matriks GRC;
 - b. Lembar Ulasan Aksi Korporasi yang telah ditandatangani oleh para Pengulas dengan mengikuti kerangka yang ada pada lampiran VII peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini;
 - c. Materi presentasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 1. Latar belakang;
 2. Ringkasan pembahasan isi Aksi Korporasi;
 3. Ringkasan pembahasan kajian / analisis sesuai dengan kerangka Lembar Dasar Keputusan / Analisis Risiko / Kajian Risiko / DMRK;
 4. Usulan Keputusan Direksi.
 - d. Ringkasan Eksekutif khusus untuk Aksi Korporasi berupa persetujuan atas penandatanganan dokumen perjanjian;
 - e. Rancangan surat ke Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk Aksi Korporasi yang membutuhkan persetujuan/tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan/atau persetujuan RUPS.
 - f. Rancangan/ *Draft* Keputusan Direksi untuk usulan Aksi Korporasi yang akan diputuskan secara Sirkuler.
- (10) Pada Rapat Direksi terdapat 3 (tiga) kemungkinan hasil dari pembahasan usulan Aksi Korporasi dengan sebagai berikut:
- a. Usulan Aksi Korporasi disetujui Direksi tanpa catatan;
 - b. Usulan Aksi Korporasi disetujui Direksi dengan catatan;
 - c. Usulan Aksi Korporasi tidak disetujui oleh Direksi.
- (11) Hasil keputusan atas Aksi Korporasi pada Rapat Direksi akan dituangkan dalam risalah Rapat Direksi sebagai dokumen internal Perusahaan dan petikan keputusan Rapat Direksi apabila dibutuhkan sebagai tindak lanjut untuk permohonan persetujuan/tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan/atau persetujuan RUPS yang mana dokumen hasil keputusan tersebut dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.
- (12) Pemrakarsa wajib menindaklanjuti catatan dari Rapat Direksi untuk setiap usulan Aksi Korporasi yang disetujui Direksi dengan catatan pada seluruh dokumen Aksi Korporasi yang diusulkan.
- (13) Alur proses usulan Aksi Korporasi sebagaimana penjelasan pada Pasal ini terdapat pada lampiran II Peraturan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan Penutup

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Direksi ini maka Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Renewables Nomor 013.K/020/DIR-PJBI/XII/2021 tentang Penerapan *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT PLN Nusantara Renewables ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Direksi Perusahaan.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Februari 2024

Direktur Utama



HARJONO



MKUM	SEKPER	KSMRPIK	DIRKEU	DIROPS
				

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKSI PLN NUSANTARA RENEWABLES
 NOMOR 004.K/020/DIR-PLNNR/II/2024
 TENTANG PEMBARUAN ATAS PROSEDUR PENERAPAN
 PRINSIP *GOVERNANCE*, *RISK MANAGEMENT* DAN
COMPLIANCE (GRC)

MATRIKS GRC

No	Jenis Tindakan	Tingkat <i>Governance</i>		Tingkat <i>Risk</i>			Tingkat <i>Compliance</i>		Tingkat GRC	Dokumen Aksi Korporasi	Pemrakarsa	
		Dasar Peraturan	Tingkat	Kemungkinan	Dampak	Tingkat	Pengambil Keputusan	Tingkat				
A		Pengembangan Usaha										
	1	Inisiasi										
	a	Penetapan <i>Long List</i> Proyek	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	A	1	Rendah	Direktur Operasi	Rendah	1	Lembar Dasar Keputusan	MPU
	b	Penetapan <i>Short List</i> Proyek	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	A	2	Rendah	Direktur Operasi	Rendah	1	Lembar Dasar Keputusan	MPU
	c	Penetapan Long List Partner dan Pendanaan	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	A	1	Rendah	Direktur Operasi	Rendah	1	Lembar Dasar Keputusan	MPU
	d	Penetapan Short List Partner dan Pendanaan	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	A	2	Rendah	Direktur Operasi	Rendah	1	Lembar Dasar Keputusan	MPU
	e	Penetapan Partner	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	C	5	Sangat Tinggi	Keputusan Direksi	Moderat	2	Analisis Risiko	MPU
	f	Usulan Penetapan Proyek dan Partner	Anggaran Dasar	Tinggi	C	5	Sangat Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MPU
	g	Penandatanganan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)	SKB Direksi-Dekom	Moderat	D	1	Rendah	Keputusan Direksi dengan Laporan ke Dekom	Moderat	2	Analisis Risiko	MPU

No	Jenis Tindakan	Tingkat Governance		Tingkat Risk			Tingkat Compliance		Tingkat GRC	Dokumen Aksi Korporasi	Pemrakarsa	
		Dasar Peraturan	Tingkat	Kemungkinan	Dampak	Tingkat	Pengambil Keputusan	Tingkat				
2	Pengembangan											
	a	Penandatanganan Consortium Agreement (CA) Proyek Non-Penugasan	Anggaran Dasar	Tinggi	C	3	Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MPU
	b	Penandatanganan Consortium Agreement (CA) Proyek Penugasan	SKB Direksi-Dekom	Moderat	C	4	Tinggi	Keputusan Direksi dengan Laporan ke Dekom	Moderat	2	Analisis Risiko	MPU
	c	Penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) Proyek Non-Penugasan	Anggaran Dasar	Tinggi	C	3	Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MPU
	d	Penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) Proyek Penugasan	SKB Direksi-Dekom	Moderat	C	4	Tinggi	Keputusan Direksi dengan Laporan ke Dekom	Moderat	2	Analisis Risiko	MPU
	e	Usulan TMD	Anggaran Dasar	Tinggi	D	5	Ekstrem	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MPU
	f	Penandatanganan <i>Shareholders' Agreement</i> (SHA) Proyek Non-Penugasan	Anggaran Dasar	Tinggi	D	4	Sangat Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MPU
	g	Penandatanganan <i>Shareholders' Agreement</i> (SHA) Proyek Penugasan	SKB Direksi Dekom	Moderat	C	4	Tinggi	Keputusan Dewan Komisaris	Tinggi	3	Kajian Risiko	MPU
	h	Penandatanganan <i>Share Subscription Agreement</i> (SSA) Proyek Non-Penugasan	Anggaran Dasar	Tinggi	D	5	Ekstrem	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MPU
	i	Penandatanganan <i>Share Subscription Agreement</i> (SSA) Proyek Penugasan	SKB Direksi Dekom	Moderat	C	4	Tinggi	Keputusan Direksi dengan Laporan ke Dekom	Moderat	2	Analisis Risiko	MPU
	j	Penandatanganan <i>Sponsor Agreement</i> (SA) Proyek Non-Penugasan	Anggaran Dasar	Tinggi	C	4	Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MPU
	k	Penandatanganan <i>Sponsor Agreement</i> (SA) Proyek Penugasan	SKB Direksi Dekom	Moderat	C	4	Tinggi	Keputusan Direksi	Moderat	2	Analisis Risiko	MPU

No	Jenis Tindakan	Tingkat Governance		Tingkat Risk			Tingkat Compliance		Tingkat GRC	Dokumen Aksi Korporasi	Pemrakarsa	
		Dasar Peraturan	Tingkat	Kemungkinan	Dampak	Tingkat	Pengambil Keputusan	Tingkat				
								dengan Laporan ke Dekom				
	l	Penandatanganan <i>Facility Agreement</i> (FA) Proyek Non-Penugasan	Anggaran Dasar	Tinggi	C	4	Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MDAN
	m	Penandatanganan <i>Facility Agreement</i> (FA) Proyek Penugasan	SKB Direksi Dekom	Moderat	C	4	Tinggi	Keputusan Direksi dengan Laporan ke Dekom	Moderat	2	Analisis Risiko	MDAN
	n	Penerbitan Jaminan (<i>Borg / Avalist</i>) dan jaminan lainnya (<i>Corporate Guarantee</i> dan sejenisnya)	Anggaran Dasar	Tinggi	D	5	Ekstrim	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MDAN
	o	Penerbitan Jaminan SBLC/LC atau <i>bonds</i> atau garansi yang timbul karena transaksi bisnis dalam rangka pengembangan usaha atas proyek pengembangan yang telah mendapat persetujuan RUPS, diantaranya: - Jaminan Penawaran - Jaminan Pelaksanaan - Kontra Garansi - Jaminan lainnya dalam rangka pelaksanaan proyek sepanjang masih dalam pagu setoran modal	SKB Direksi Dekom	Moderat	D	5	Ekstrim	Keputusan Direksi	Moderat	2	Analisis Risiko	MDAN
	p	Usulan Pendirian JVC	Anggaran Dasar	Tinggi	D	5	Ekstrim	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MPU
	q	Penunjukan Wakil Perseroan untuk Direksi - Dewan Komisaris APPA	Anggaran Dasar	Tinggi	D	5	Ekstrim	RUPS	Sangat Tinggi	1	Lembar Dasar Keputusan	MSDM
	r	Penunjukan Wakil Perseroan untuk Non - Direksi - Dewan Komisaris APPA	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	C	2	Moderat	Keputusan Direksi	Moderat	1	Lembar Dasar Keputusan	MSDM
B		Portofolio										
1		RUPS APPA										
	a	Persetujuan RUPS rutin APPA	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	D	3	Tinggi	Keputusan Direksi	Moderat	2	Analisis Risiko	MPFO

No	Jenis Tindakan	Tingkat Governance		Tingkat Risk			Tingkat Compliance		Tingkat GRC	Dokumen Aksi Korporasi	Pemrakarsa	
		Dasar Peraturan	Tingkat	Kemungkinan	Dampak	Tingkat	Pengambil Keputusan	Tingkat				
	b	Persetujuan RUPS Luar Biasa APPA (Perubahan Minor)	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	D	4	Sangat Tinggi	Keputusan Direksi	Moderat	2	Analisis Risiko	MPFO
	c	Persetujuan RUPS Luar Biasa APPA (Perubahan Mayor)	Anggaran Dasar	Tinggi	D	4	Sangat Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MPFO
2		Organisasi										
	a	Persetujuan Struktur Organisasi APPA	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	B	2	Rendah	Keputusan Direksi	Moderat	2	Analisis Risiko	MPFO
	b	Penggantian Wakil Perusahaan untuk Direksi – Dewan Komisaris APPA	Anggaran Dasar	Tinggi	B	2	Rendah	RUPS – SDM	Rendah	1	Lembar Dasar Keputusan	MSDM
	c	Penggantian Wakil Perusahaan untuk Non Direksi – Dewan Komisaris APPA	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	B	2	Rendah	Keputusan Direksi	Moderat	1	Lembar Dasar Keputusan	MSDM
3		Pengelolaan Investasi										
	a	Penggabungan/Peleburan APPA	Anggaran Dasar	Tinggi	B	5	Sangat Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MPU
	b	Pengambilalihan APPA	Anggaran Dasar	Tinggi	B	5	Sangat Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MPU
	c	Pemisahan APPA	Anggaran Dasar	Tinggi	B	5	Sangat Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MPFO
	d	Pembubaran APPA	Anggaran Dasar	Tinggi	B	5	Sangat Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MPFO
C		Umum										
1		Korporat										
	a	Penetapan <i>Blue Print</i> Perusahaan (RJPP)	Anggaran Dasar	Tinggi	A	5	Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MDAN
	b	Usulan RKAP	Anggaran Dasar	Tinggi	C	2	Moderat	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MDAN
	c	Usulan LPT	Anggaran Dasar	Tinggi	B	2	Rendah	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MKEU
	d	Penetapan/perubahan Nama Perusahaan	Anggaran Dasar	Tinggi	B	4	Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	SEKPER
	e	Penetapan/perubahan Logo Perusahaan	Anggaran Dasar	Tinggi	B	3	Moderat	Keputusan Dewan Komisaris	Tinggi	3	Kajian Risiko	SEKPER

No	Jenis Tindakan	Tingkat Governance		Tingkat Risk			Tingkat Compliance		Tingkat GRC	Dokumen Aksi Korporasi	Pemrakarsa	
		Dasar Peraturan	Tingkat	Kemungkinan	Dampak	Tingkat	Pengambil Keputusan	Tingkat				
	f	Pembentukan Yayasan, Organisasi dan/atau Perkumpulan	Anggaran Dasar	Tinggi	B	1	Rendah	Keputusan Dewan Komisaris	Tinggi	3	Kajian Risiko	SEKPER
	g	Penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	B	1	Rendah	Keputusan Direksi	Moderat	1	Lembar Dasar Keputusan	SEKPER
2		Keuangan										
	a	Pelepasan Aktiva Tetap bergerak (Umur Ekonomis 0-5 Tahun)	Anggaran Dasar	Tinggi	C	3	Tinggi	Keputusan Dewan Komisaris	Tinggi	3	Kajian Risiko	MKEU
	b	Penggunaan Aktiva Tetap dalam rangka Penarikan Kredit Perusahaan	Anggaran Dasar	Tinggi	C	4	Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MDAN
	c	Pelepasan/Penghapusan Aktiva Tetap di luar Aktiva tetap Bergerak hingga 5 Tahun	Anggaran Dasar	Tinggi	C	4	Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MKEU
	d	Penghapusan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati	Anggaran Dasar	Tinggi	C	3	Tinggi	Keputusan Dewan Komisaris	Tinggi	3	Kajian Risiko	MKEU
3		Anggaran										
	a	Penerimaan atau Pemberian Pinjaman selain Pinjaman Pemegang Saham	Anggaran Dasar	Tinggi	C	4	Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MDAN
	b	Penerimaan atau Pemberian pinjaman dari Pemegang Saham	Anggaran Dasar	Tinggi	B	2	Rendah	Keputusan Dewan Komisaris	Tinggi	3	Kajian Risiko	MDAN
	c	Perubahan antar Pos Anggaran Tanpa Merubah Pagu Anggaran	Anggaran Dasar	Tinggi	B	1	Rendah	Keputusan Dewan Komisaris	Tinggi	3	Kajian Risiko	MDAN
	d	Perubahan antar Pos Anggaran dengan Perubahan Pagu Anggaran	Anggaran Dasar	Tinggi	B	4	Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MDAN
	e	Tindakan-tindakan di luar RKAP	Anggaran Dasar	Tinggi	B	5	Sangat Tinggi	RUPS	Sangat Tinggi	4	DMRK	MDAN
4		SDM										
	a	Penetapan Struktur Organisasi 1 level di bawah Direksi	Anggaran Dasar	Tinggi	B	4	Tinggi	Keputusan Dewan Komisaris	Tinggi	3	Kajian Risiko	MSDM
	b	Penetapan FTK Organisasi	Anggaran Dasar	Tinggi	B	4	Tinggi	Keputusan Direksi	Rendah	2	Analisis Risiko	MSDM

No	Jenis Tindakan	Tingkat Governance		Tingkat Risk			Tingkat Compliance		Tingkat GRC	Dokumen Aksi Korporasi	Pemrakarsa	
		Dasar Peraturan	Tingkat	Kemungkinan	Dampak	Tingkat	Pengambil Keputusan	Tingkat				
	c	Penetapan KKJ Organisasi	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	B	4	Tinggi	Keputusan Direksi	Rendah	2	Analisis Risiko	MSDM
	d	Penetapan Budaya Organisasi	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	B	4	Tinggi	Keputusan Direksi	Rendah	2	Analisis Risiko	MSDM
	e	Pengangkatan/Pemberhentian Karyawan	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	C	3	Tinggi	Keputusan Direksi	Rendah	2	Analisis Risiko	MSDM
	f	Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Satuan dan Sekretaris Perusahaan	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	C	3	Tinggi	Keputusan Dewan Komisaris	Tinggi	1	Lembar Dasar Keputusan	MSDM
5		Pengadaan										
	a	Penetapan Pemenang Lelang Terbatas diatas Rp 500.000.000	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	B	3	Moderat	Keputusan Direksi	Rendah	2	Analisis Risiko	MSDM
	b	Penetapan Pemenang Lelang Terbuka diatas Rp 500.000.000	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	A	3	Moderat	Keputusan Direksi	Rendah	2	Analisis Risiko	MSDM
	c	Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung diatas Rp 500.000.000	Keputusan / Peraturan Direksi	Rendah	A	3	Moderat	Keputusan Direksi	Rendah	2	Analisis Risiko	MSDM

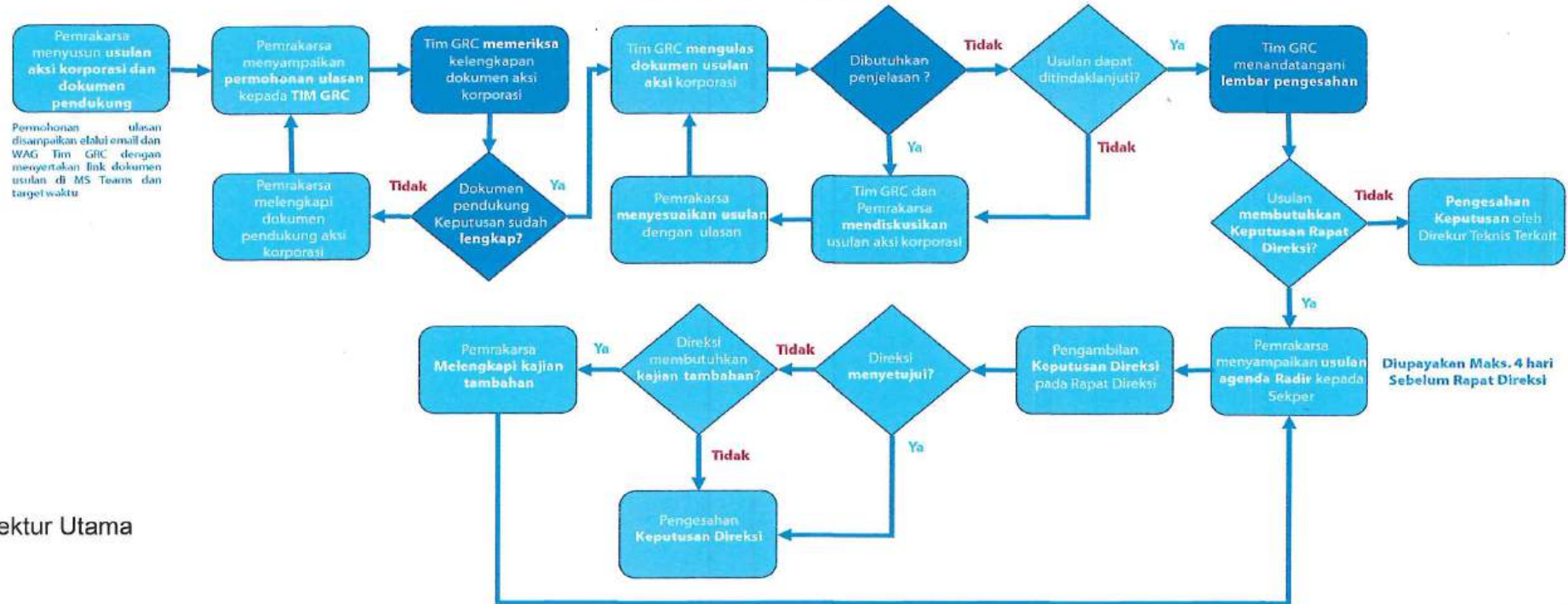
Direktur Utama



HARJONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKSI PLN NUSANTARA RENEWABLES
 NOMOR 004.K/020/DIR-PLNNR/II/2024
 TENTANG PEMBARUAN ATAS PROSEDUR PENERAPAN
 PRINSIP GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT DAN
 COMPLIANCE (GRC)

ALUR PROSES GRC



Direktur Utama

HARJONO

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKSI PLN
NUSANTARA RENEWABLES
NOMOR 004.K/020/DIR-
PLNNR/II/2024
TENTANG PEMBARUAN ATAS
PROSEDUR PENERAPAN
PRINSIP GOVERNANCE, RISK
MANAGEMENT DAN
COMPLIANCE (GRC)

KERANGKA DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO (DMRK)



	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 1 dari 26

LEMBAR PENGESAHAN

No. : *<untuk ditanyakan kepada SMRPIK untuk monitoring penomoran>*
 Nama Program : *<samakan dengan judul DMRK yang akan dikaji>*
 Sasaran/KPI : *<samakan dengan penjabaran sasaran di sub-bab 5.1>*
 Klasifikasi Program : *<pengembangan Usaha/Perencanaan Korporat/ etc>*
 Lokasi : *<apabila diperlukan>*
 Kapasitas : *<apabila diperlukan>*
 Estimasi Biaya : *<sesuaikan dengan besar rencana anggaran Perusahaan>*
 Sumber Dana : *<sesuaikan dengan RKAP>*

Dokumen Manajemen Risiko ini dibuat dalam rangka memenuhi kebijakan dan peraturan sebagai tindak lanjut dari penerapan *Good Corporate Governance* dan *Governance Risk Compliance* di PT PLN Nusantara Renewables.

<kota, dd-mm-yyyy>

Pemrakarsa,
*<jabatan manajer
bidang/satuan
pengusul>*

Kepala Satuan
Manajemen Risiko,
Pengawasan Internal,
dan Kinerja

Diperiksa Oleh,
Sekretaris Perusahaan

Manajer Hukum

<nama>

<nama>

<nama>

<nama>

Disetujui Oleh,
Direktur *<Pemrakarsa>*

Disetujui Oleh,
Direktur *<Selain Pemrakarsa>*

<nama>

<nama>

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 2 dari 26

LEMBAR PEMRAKARSA

Judul DMRK : *<samakan dengan judul DMRK yang akan dikaji>*

Sasaran : *<samakan dengan penjabaran sasaran di sub-bab 5.1>*

- Dokumen Manajemen Risiko ini disusun oleh Pemrakarsa berdasarkan data dan informasi yang lengkap dan bertanggung jawab terhadap keabsahan, kebenaran, dan keakuratan data serta informasi yang disampaikan dalam usulan, termasuk dalam Kajian Risiko dan kajian kelayakan lain yang menyertai.
- Dokumen Manajemen Risiko terdiri dari:
 - Kajian Operasi
 - Kajian Finansial
 - **Kajian Lingkungan (jika ada)**
 - Kajian Kepatuhan
 - Kajian Risiko
 - Lampiran Kajian Risiko
 - Lampiran Data Pendukung

<kota, dd-mm-yyyy>

Pemrakarsa,

<nama>

<jabatan manajer bidang/ satuan pengusul>

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 3 dari 26

LEMBAR PENGULAS

Dokumen Manajemen Risiko ini diverifikasi oleh Satuan Manajemen Risiko, Pengawasan Internal dan Kinerja PT PLN Nusantara Renewables dan hasilnya telah disepakati bersama.

Nomor Pengesahan : *<untuk ditanyakan kepada SMRPIK untuk monitoring penomoran>*

Judul DMRK : *<samakan dengan judul DMRK yang akan dikaji>*

Sasaran : *<samakan dengan penjabaran sasaran di sub-bab 5.1>*

- Dokumen Manajemen Risiko ini diverifikasi berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemilik Risiko (*Risk Owner*) dan data yang disampaikan dianggap benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pemrakarsa perlu melaporkan progress pelaksanaan kontrol risiko, mitigasi risiko dan adanya risiko baru yang muncul secara periodik kepada Satuan Manajemen Risiko, Pengawasan Internal dan Kinerja selama pekerjaan berlangsung melalui Laporan Manajemen Risiko Program dan/atau pada aplikasi Manajemen Risiko.

No	Kajian	Pengulas	Tanda Tangan
1.	Kajian Kepatuhan	<i><nama></i> Manajer Hukum	
2.	Kajian Risiko	<i><nama></i> Kepala Satuan Manajemen Risiko, Pengawasan Internal dan Kinerja	
3.	<i>Kajian sesuai dengan kebutuhan (Contoh: Lingkungan, SDM)</i>	<i><nama></i> <i><jabatan manajer bidang/ satuan pengusul></i>	

Note :

1. Jumlah dan pihak Pengulas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi DMRK yang dibahas.
2. Apabila Pengulas dan Pemrakarsa berasal dari Divisi/Bidang yang sama maka Satuan Kerja Manajemen Risiko, Pengawasan Internal, dan Kinerja berwenang menunjuk Pengulas tambahan.

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 4 dari 26

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	1
LEMBAR PEMRAKARSA.....	2
LEMBAR PENGULAS.....	3
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Sasaran dan Tujuan Kegiatan/Program.....	8
1.3 Permasalahan.....	8
1.4 Alternatif Cara Pencapaian Sasaran.....	8
1.5 Dasar Kebijakan.....	9
BAB II KAJIAN OPERASI.....	10
2.1 Pendahuluan.....	10
2.1.1 Aspek Ekonomi <Optional khusus untuk Program Pengembangan Usaha>.....	10
2.1.2 Aspek Sistem Kelistrikan <Optional khusus untuk Program Pengembangan Usaha Pembangunan Pembangkit>.....	10
2.1.3 Aspek Operasional Terhadap Pembangkit Existing <Optional khusus untuk Program Pengembangan Usaha Pembangunan Pembangkit>.....	10
2.1.4 Aspek Lokasi, Sosial dan Lingkungan <Optional khusus untuk Program Pengembangan Usaha>.....	10
2.1.5 Aspek Teknologi Pembangkit <Optional khusus untuk Program Pengembangan Usaha>.....	11
2.1.6 Aspek Energi Primer (Optional khusus Program Pengembangan Usaha Pembangkit Listrik).....	12
2.2 Kajian Alternatif.....	13
2.3 Ruang lingkup kegiatan.....	14
2.4 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.....	14
2.5 Kesimpulan Kajian Operasi.....	14
BAB III KAJIAN FINANSIAL.....	15
3.1 Pendahuluan.....	15
3.1.1 Pendanaan (Optional khusus untuk Program Pengembangan Usaha).....	15

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 5 dan 26

3.1.2	Skema Bisnis (Optional khusus untuk Program Pengembangan Usaha)	16
3.2	Ruang Lingkup Kajian	16
3.3	Asumsi yang Digunakan	16
3.4	Analisis Biaya	17
3.5	Analisis Parameter Keuangan	17
3.6	Kesimpulan Kajian Finansial	17
BAB IV KAJIAN KEPATUHAN		18
4.1	Kajian Kepatuhan Terhadap Kebijakan/Regulasi	18
4.2	Analisis dan Evaluasi Benturan Kepentingan	18
4.3	Kajian Risiko Fraud (Fraud Risk Assessment)	19
BAB V KAJIAN RISIKO		21
5.1	Penjabaran Sasaran	21
5.2	Uji Sasaran SMART	21
5.3	Konteks/issue/scope yang digunakan:	21
5.4	Identifikasi Risiko	21
5.5	Analisis dan Evaluasi Risiko	22
5.6	Rencana Pengendalian Risiko	23
5.7	Rencana Mitigasi Risiko	23
BAB VI KESIMPULAN		25
LAMPIRAN DATA PENDUKUNG		26

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 6 dari 26

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Profil Risiko Korporat	8
Tabel 2 Alternatif Lokasi	11
Tabel 3 Alternatif Teknologi Pembangkit	12
Tabel 4 Alternatif Solusi	13
Tabel 5 Analisis Kepatuhan terhadap Regulasi	18
Tabel 6 Uji Sasaran SMART	21
Tabel 7 Konteks Risiko	21
Tabel 8 Identifikasi Risiko	21
Tabel 9 Analisis Risiko	22
Tabel 10 Rencana Pengendalian Risiko	23
Tabel 11 Rencana Mitigasi Risiko	23

<format caption tabel dapat diambil dari tabel 1 dalam Bab 1.1>

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 7 dari 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Timeline <nama Program>	14
Gambar 2 Peta Risiko	23

<format caption gambar dapat diambil dari gambar 1 dalam Bab 2.4>

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 8 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

<identifikasi hal-hal yang mendasari kegiatan atau kronologis peristiwa yang mendasari dilakukannya kegiatan>

.....

<identifikasi risiko/masalah awal, kenapa kegiatan ini harus dilakukan – dimana kegiatan ini sebagai mitigasi dari risiko/masalah tersebut. Umumnya risiko awalnya diambil dari Profil Risiko Korporat pada tahun berjalan yang terkait dengan program>

Tabel 1 Profil Risiko Korporat

No	Identifikasi Risiko Inheren			Level Risiko Pasca Control	Mitigasi	Level Risiko Residual
	Risiko	Penyebab	Dampak			

1.2 Sasaran dan Tujuan Kegiatan/Program

<sasaran sub bab 1.2 ini sama dengan Lembar Persetujuan dan sub bab 5.1>

.....

1.3 Permasalahan

<menjelaskan permasalahan yang mendasari kegiatan yang akan dilakukan>

.....

1.4 Alternatif Cara Pencapaian Sasaran

<harus memiliki minimal 2 alternative solusi namun jika bersifat mandatory/ keputusan maka dapat memiliki 1 alternatif solusi>

Untuk mencapai sasaran kegiatan/program yang diinginkan diatas ada beberapa pilihan yaitu:

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen	: FM111.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi	: 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit	: Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman	: 9 dari 26

Alternatif #1 :

.....

Alternatif #2 :

.....

Alternatif #3 :

.....

1.5 Dasar Kebijakan

<berisi daftar regulasi/aturan/perundang-undangan/Notulen dan dokumen serta kebijakan lain yang mendasari program tersebut diusulkan. Diurut berdasarkan tingkatan regulasi dan jika tingkatan sama diurutkan berdasarkan tahun terbaru>

1.

.....

2.

.....

3.

.....

dst

10,

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 10 dari 26

BAB II KAJIAN OPERASI

2.1 Pendahuluan

<sampaikan informasi tahapan, atau rangkaian operasi/pelaksanaan terkait kegiatan yang akan dilakukan>

.....

<Khusus untuk Program Pengembangan Usaha seperti Penugasan Pembangunan Pembangkit maupun Pembangunan Pembangkit diluar Penugasan, serta untuk Kelayakan Pengembangan Usaha yang memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga dan berskala besar agar ditambahkan aspek-aspek sbb (2.1.1 s/d 2.1.6)>

2.1.1 Aspek Ekonomi <Optional khusus untuk Program Pengembangan Usaha>

<identifikasi hal-hal khusus, terkait konteks makro maupun mikro ekonomi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha>

2.1.2 Aspek Sistem Kelistrikan <Optional khusus untuk Program Pengembangan Usaha Pembangunan Pembangkit>

<identifikasi hal-hal khusus, terkait konteks rencana maupun kondisi sistem ketemagalistrikan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha>

2.1.3 Aspek Operasional Terhadap Pembangkit Existing <Optional khusus untuk Program Pengembangan Usaha Pembangunan Pembangkit>

<identifikasi hal-hal khusus, terkait pengaruh operasionalnya terhadap pembangkit existing yang dimiliki oleh PLN NR Group>

2.1.4 Aspek Lokasi, Sosial dan Lingkungan <Optional khusus untuk Program Pengembangan Usaha>

<identifikasi hal-hal khusus, terkait rencana lokasi pengembangan kondisi sosial dan lingkungan yang dapat mempengaruhi>

.....

<JIKA ADA beberapa alternatif lokasi, mohon disampaikan dijelaskan dan dinilai kelayakan untuk masing-masing alternatif tersebut>

Alternatif #1:

.....

 PLN Perusahaan Listrik Nusantara	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES		No Dokumen	: FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		Revisi	: 00
	FORMULIR		Tanggal Terbit	: Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan		Halaman	: 11 dari 26

Alternatif #2:

Alternatif #3:

Tabel 2 Alternatif Lokasi

No.	Aspek	Bobot (%)	Alternatif 1: xxx			Alternatif 2: yyy			Alternatif 3: zzz		
			Uraian	Skor	Nilai	Uraian	Skor	Nilai	Uraian	Skor	Nilai
1	Tingkat Kesulitan	30									
2	Durasi Pekerjaan	25									
3	Pengalaman Pekerjaan	10									
4	Safety Factor	20									
5	Pencemaran	10									
6	Biaya	5									
		100									

**) Aspek diatas disesuaikan dengan kondisi, skor yang ditampilkan agar diberikan penjelasan untuk justifikasinya.*

2.1.5 Aspek Tekonologi Pembangkit <Optional khusus untuk Program Pengembangan Usaha>

<identifikasi hal-hal khusus, terkait teknologi pembangkit yang rencananya akan digunakan>

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 12 dari 26

«JIKA ADA beberapa alternatif teknologi pembangkit, mohon disampaikan, dijelaskan dan dinilai kelayakan untuk masing-masing alternatif tersebut»

Alternatif #1:

.....

Alternatif #2:

.....

Alternatif #3:

.....

Tabel 3 Alternatif Teknologi Pembangkit

No.	Aspek	Bobot (%)	Alternatif 1: xxx			Alternatif 2: yyy			Alternatif 3: zzz		
			Uraian	Skor	Nilai	Uraian	Skor	Nilai	Uraian	Skor	Nilai
1	Tingkat Kesulitan	30									
2	Durasi Pekerjaan	25									
3	Pengalaman Pekerjaan	10									
4	Safety Factor	20									
5	Pencemaran	10									
6	Biaya	5									
		100									

**) Aspek diatas dapat disesuaikan dengan kondisi, skor yang ditampilkan agar diberikan penjelasan untuk justifikasinya.*

2.1.6 Aspek Energi Primer (Optional khusus Program Pengembangan Usaha Pembangkit Listrik)

«identifikasi hal-hal khusus, terkait ketersediaan energi primer dan informasi lain terkait energi primer pada pengembangan usaha»

 PLN Nusantara Renewables	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11,1,1,2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 13 dari 26

2.2 Kajian Alternatif

<harus memiliki minimal 2 alternative solusi, namun jika bersifat mandatory/keputusan maka dapat memiliki 1 alternatif solusi>

<JIKA ADA beberapa alternatif solusi, mohon disampaikan, dijelaskan dan dinilai kelayakan untuk masing-masing alternatif tersebut>

Alternatif #1:

.....

.....

.....

.....

Alternatif #2:

.....

.....

.....

.....

Alternatif #3

.....

.....

.....

.....

Tabel 4 Alternatif Solusi

No.	Aspek	Bobot (%)	Alternatif 1: xxx			Alternatif 2: yyy			Alternatif 3: zzz		
			Uraian	Skor	Nilai	Uraian	Skor	Nilai	Uraian	Skor	Nilai
1	Tingkat Kesulitan	30									
2	Durasi Pekerjaan	25									
3	Pengalaman Pekerjaan	10									
4	Safety Factor	20									
5	Pencemaran	10									
6	Biaya	5									
		100									

**1) Tabel diatas dapat disesuaikan dengan kondisi, skor yang ditampilkan agar diberikan penjelasan untuk justifikasinya*

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 14 dari 26

Berdasarkan tabel diatas maka alternatif yang direkomendasikan adalah alternatif Dengan mempertimbangkan:

- a.
- b.
- c.

2.3 Ruang lingkup kegiatan

Ruang lingkup kegiatan ini adalah:

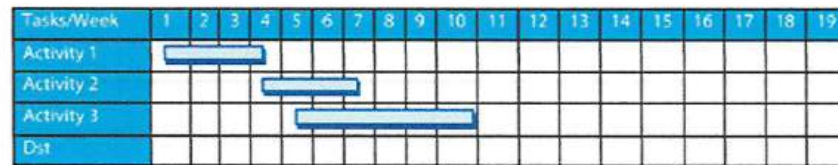
- 1.
- 2.
- 3.dst

2.4 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Durasi pekerjaan adalah hari kalender

.....

Timeline Pelaksanaan Pekerjaan



Gambar 1 Timeline <nama Program>

2.5 Kesimpulan Kajian Operasi

Berdasarkan hasil Kajian Operasi dapat disimpulkan:

.....

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 15 dari 26

BAB III KAJIAN FINANSIAL

3.1 Pendahuluan

<sampaikan sisi keuangan dan/atau anggaran terkait kegiatan yang akan dilakukan>

.....

.....

.....

.....

.....

<JIKA ADA beberapa alternatif pencapaian sasaran, mohon disampaikan, dijelaskan dan dinilai kelayakan untuk masing-masing alternatif tersebut>

Alternatif #1:

.....

.....

.....

.....

Alternatif #2:

.....

.....

.....

.....

Alternatif #3:

.....

.....

.....

.....

<Khusus untuk Program Pengembangan Usaha seperti Penugasan Pembangunan Pembangkit maupun Pembangunan Pembangkit diluar Penugasan, serta untuk Kelayakan Pengembangan Usaha yang memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga dan berskala besar agar ditambahkan aspek-aspek sbb (3.1.1 s/d 3.1.2):

3.1.1 Pendanaan (Optional khusus untuk Program Pengembangan Usaha)

.....

.....

.....

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 16 dari 26

<JIKA ADA beberapa alternatif skema pendanaan, mohon disampaikan, dijabarkan dan dinilai kelayakan untuk masing-masing alternatif tersebut>

Alternatif #1:

.....

.....

.....

.....

Alternatif #2:

.....

.....

.....

.....

Alternatif #3:

.....

.....

.....

.....

3.1.2 Skema Bisnis (Optional khusus untuk Program Pengembangan Usaha)

.....

.....

.....

.....

3.2 Ruang Lingkup Kajian

.....

.....

.....

.....

3.3 Asumsi yang Digunakan

.....

.....

.....

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 17 dari 26

.....

3.4 Analisis Biaya

.....

3.5 Analisis Parameter Keuangan

< dapat dilakukan CBA dengan parameter tondar diantaranya NPV, IRR dan Payback Period, untuk serta diagram atau ilustrasi yang disampaikan agar diberikan penjelasan >

.....

3.6 Kesimpulan Kajian Finansial

Berdasarkan hasil Kajian Finansial dapat disimpulkan:

.....

6

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 18 dari 26

**BAB IV
KAJIAN KEPATUHAN**

4.1 Kajian Kepatuhan Terhadap Kebijakan/Regulasi

<Merupakan detail dari sub bab 1.5 Dasar kebijakan yang menjadi referensi utama atas Dokumen, Manajemen Risiko yang diajukan berisi regulasi eksternal (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan peraturan lain-lain), regulasi internal (SK Direksi dan DEKOM PT PLN NR, SK Direksi, SK Dekom, SE Direksi), dokumen dan kebijakan lainnya, terhadap pelaksanaan program. Menjelaskan dampak/pengaruh kebijakan/peraturan/regulasi terhadap proses bisnis PT PLN NR terkait pelaksanaan kegiatan>

Berikut ini merupakan dampak ketentuan persyaratan dalam regulasi terhadap proses bisnis PT PLN NR berdasarkan regulasi yang mempengaruhi kegiatan.

Tabel 5 Analisis Kepatuhan terhadap Regulasi

No	Klasifikasi Peraturan / Regulasi	Peraturan (Nomor, Judul dan Pasal)	Resume	Implikasi terhadap PT PLN NR	Action	PIC
1.
2.
3.
dst

4.2 Analisis dan Evaluasi Benturan Kepentingan

<Merupakan analisis dan evaluasi terkait adanya kemungkinan atau terjadinya benturan kepentingan yang dialami/dihadapi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Referensi yang digunakan untuk pengisian Form Analisis dan Evaluasi Benturan Kepentingan mengacu pada Surat Keputusan Bersama antara Direksi PT PLN Nusanantara Renewables dan Dewan Komisaris PT PLN Nusanantara Renewables Nomor 009.K/021/SKB-DIR/XII/2021 dan Nomor 005.K/021/SKB-DKM/XII/2021 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT PLN Nusanantara Renewables>

Berikut ini merupakan hasil analisis dan evaluasi terkait adanya kemungkinan atau terjadinya benturan kepentingan yang dialami/dihadapi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil analisis dan evaluasi benturan kepentingan sebagai berikut:

Daftar Pertanyaan berdasarkan Penyebab/ Sumber terjadinya Benturan Kepentingan		Respon Pemrakarsa	Penanganan Situasi Benturan Kepentingan *)
I	Hubungan Afiliasi		
I.1	Apakah terdapat hubungan keluarga atau lainnya antara Pegawai pada Unit Kerja saudara dengan Direksi, Dewan Komisaris, atau pejabat kunci calon mitra/mitra terkait topik GRC diatas?		

101

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 19 dari 26

I.2	Apabila menjawab Ya pada nomor 1, siapa saja dan bagaimana hubungan antar pihak tersebut?		
II Memiliki Pekerjaan Sampingan diluar pekerjaan pokoknya (Moonlighting)			
II.1	Apakah terdapat pegawai pada Unit Kerja saudara yang memiliki pekerjaan lain (moonlighting) terkait topik GRC diatas?		
II.2	Apabila menjawab Ya pada nomor 1, siapa saja dan bagaimana hubungan pekerjaan tersebut?		
III Perangkapan Jabatan			
III.1	Apakah terdapat pegawai pada Unit Kerja saudara yang memiliki perangkapan jabatan terkait topik GRC diatas?		
III.2	Apabila menjawab Ya pada nomor 1, sebutkan siapa saja dan bagaimana hubungan perangkapan jabatan tersebut?		
III.3	Apabila menjawab Ya pada nomor 1, apakah perangkapan jabatan mempengaruhi pengambilan keputusan?		
III.4	Apabila menjawab Ya pada nomor 3, jelaskan bagaimana pengaruhnya dalam pengambilan keputusan terkait topik GRC diatas?		
IV Kepemilikan Aset			
IV.1	Apakah terdapat pegawai pada Unit Kerja saudara yang memiliki aset pada perusahaan terkait topik GRC diatas?		
IV.2	Apabila menjawab Ya pada nomor 1, sebutkan:		
	a. Siapa saja pegawai yang memiliki aset?		
	b. Apa saja jenis asetnya?		
	c. Berapa nilai atau porsi dari kepemilikan aset tersebut?		

Pemrakarsa dengan ini menyatakan:

Apabila dikemudian hari terdapat potensi benturan kepentingan terkait <Nama Program> selain yang telah dinyatakan pada tabel diatas, maka pemrakarsa akan memperbarui, menandatangani dan menyampaikan dokumen analissi dan evaluasi terkait benturan kepentingan terbaru kepada Satuan Manajemen Risiko, Pengawasan Internal, dan Kinerja serta melakukan tindakan penanganan situasi benturan kepentingan.

4.3 Kajian Risiko Fraud (Fraud Risk Assessment)

<Pemetaan risiko Fraud (Fraud Risk Assessment) adalah suatu proses identifikasi, analisis dan evaluasi atas kerentanan suatu organisasi dalam menghadapi risiko Fraud. Referensi yang digunakan untuk pengisian Form Kajian Risiko Fraud mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT PLN Nusantara

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 20 dari 26

Renewables Nomor 002.K/020/DIR-PJBM/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan PT PLN Nusantara Renewables dan Pedoman Pelaksanaan FRA.

Untuk Sub-Bab: Kajian Risiko Fraud dan Form Kajian Risiko Fraud merupakan optional, hanya disampaikan ketika pelaksanaan kegiatan membutuhkan keputusan/persetujuan PT PLN (Persero) atau RUPS. Pemilik proses bisnis/ risk owner sebagai penanggung jawab atas risiko fraud harus berkomitmen dalam melaksanakan dan mengkomunikasikan tindak lanjut maupun melaporkan progresnya secara rutin kepada pengelola manajemen risiko di Kantor Pusat pada Aplikasi I-Care>

Berikut ini merupakan hasil identifikasi risiko fraud terhadap pelaksanaan kegiatan. Hasil identifikasi risiko fraud dapat dilihat pada form terlampir.

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 21 dari 26

BAB V KAJIAN RISIKO

Berdasarkan hasil Kajian Operasi, Finansial, Kepatuhan, dan Lingkungan (jika ada) maka alternatif yang dipilih dan akan dilakukan kajian risikonya sebagai berikut:

5.1 Penjabaran Sasaran

<summary dari sub bab 5.2 specific + measurable + achievable + relevant + time bound>

.....

.....

.....

.....

5.2 Uji Sasaran SMART

Berikut Uji SMART untuk sasaran di atas.

Tabel 6 Uji Sasaran SMART

Specific	<i><sasaran specific kegiatan, hal yang ingin dicapai></i>
Measurable	<i><ukuran/parameter keberhasilannya/indikator dan nilai target></i>
Achievable	<i><bagaimana cara untuk mencapai></i>
Relevant	<i><alignment dengan sasaran sasaran korporat (RUPP/RKAP)></i>
Time Bound	<i><jangka waktu pencapaian></i>

5.3 Konteks/issue/scope yang digunakan:

Pada kajian risiko ini, terdapat beberapa risiko yang teridentifikasi dan berpotensi muncul sehingga dapat menghambat dalam pencapaian sasaran di atas. Berikut merupakan konteks dari setiap risiko yang muncul pada kajian risiko.

<tidak perlu seimbang antara external dan internal>

Tabel 7 Konteks Risiko

No	Konteks/Issue Internal
1	<i><untuk diisikan kondisi internal (dimana PLN NR ikut andil/terlibat) yang sudah/saat ini terjadi dan menimbulkan potensi risiko terhadap sasaran kegiatan proyek, sebagai contoh : SK Penugasan Proyek, SHA, etc></i>
2	
dst	
No	Konteks/ Issue External
1	<i><untuk diisikan kondisi eksternal (dimana PLN NR tidak ikut andil/terlibat) yang sudah/saat ini terjadi dan menimbulkan potensi risiko terhadap sasaran kegiatan proyek, sebagai contoh : Perubahan Peraturan TKDN, adanya restrukturisasi PLN Holding, etc></i>
2	
dst	

5.4 Identifikasi Risiko

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, *<nama program>* memiliki risiko sebagai berikut:

Tabel 8 Identifikasi Risiko

No	Taksonomi Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak
1			Controllable.	

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 22 dari 26

			1. <penyebab dimana PLN NR ikut andil> Uncontrollable: 1. <penyebab dimana PLN NR tidak ikut andil/eksternal>	
2				
3				
Dst				

<taksonomi risiko berdasarkan pedoman manajemen risiko PLN NR di Bab Lampiran>

5.5 Analisis dan Evaluasi Risiko

.....

.....

.....

.....

Tabel 9 Analisis Risiko

No	Statement Risiko	Inherent Risk	Residual Risk
1	<risiko> karena <penyebab> sehingga <dampak>		
2			
dst			

Tingkat Kemungkinan	Sangat Besar	E	Moderat	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Besar	D	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Sedang	C	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
	Kecil	B	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
	Sangat Kecil	A	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi
				1	2	3	4

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 23 dari 26

Tidak Signifikan	Minor	Medium	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Dampak				

Keterangan

Inherent Risk Residual Risk

Gambar 2 Peta Risiko

5.6 Rencana Pengendalian Risiko

<prolog jika ada catatan khusus yang akan disampaikan>

.....

.....

.....

.....

Tabel 10 Rencana Pengendalian Risiko

No	Statement Risiko	Pengendalian/ Kontrol	Referensi Dokumen	Periode Kontrol	PIC
1	<risiko> karena <penyebab> sehingga <dampak>		Merujuk pada regulasi prosedur yang berlaku		
2					
dst					

5.7 Rencana Mitigasi Risiko

<prolog jika ada catatan khusus yang akan disampaikan>

.....

.....

.....

.....

Tabel 11 Rencana Mitigasi Risiko

No	Statement Risiko	Mitigasi	Due Date	PIC
1	<risiko> karena <penyebab> sehingga <dampak>			
2				
dst				

<jika ada catatan khusus yang akan disampaikan>

.....

.....

le

 PLN NUSANTARA RENEWABLES	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 25 dari 26

BAB VI KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asumsi-asumsi tersebut masih relevan dalam situasi dan kondisi yang ada.

1. Secara Operasional **dapat** dilaksanakan dengan pertimbangan.....
2. Secara Finansial **dapat** dilaksanakan dengan pertimbangan.....
3. Kajian Kepatuhan dari alternatif dapat dinyatakan keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik dan tidak melanggar ketentuan kepatuhan terhadap regulasi.
4. Kajian Risiko dari alternatif yang dipilih memperlihatkan bahwa terdapat <jumlah total> Risiko dengan rincian <jumlah> Risiko ekstrem <jumlah> Risiko tinggi <jumlah> Risiko moderat <jumlah> Risiko rendah. Namun apabila pengendalian/kontrol dilaksanakan secara konsisten dan rencana mitigasi dilakukan secara efektif, diharapkan tingkat risiko-risiko tersebut dapat turun hingga *risk appetite* yang telah ditentukan

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Halaman : 26 dari 26

LAMPIRAN DATA PENDUKUNG

26

DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

<Aksi DMRS>

© 2024 PLN Nusantara Renewables

Direktur Utama

HARJONO

LAMPIRAN IV

10,

PERATURAN DIREKSI PLN
NUSANTARA RENEWABLES
NOMOR 004.K/020/DIR-
PLNNR/II/2024
TENTANG PEMBARUAN ATAS
PROSEDUR PENERAPAN
PRINSIP GOVERNANCE, RISK
MANAGEMENT DAN
COMPLIANCE (GRC)

KERANGKA DOKUMEN KAJIAN RISIKO



	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Kajian Risiko	Halaman : 1 dari 7

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor : *<untuk ditanyakan kepada SMARTIK untuk monitoring penomoran>*
 Nama Program : *<samakan dengan judul kegiatan>*
 Sasaran/KPI : *<samakan dengan penjabaran sasaran melalui SMART>*
 Klasifikasi Program : *<pengembangan Usaha/ Perencanaan Korporat/ etc>*
 Estimasi Biaya : *<sesuaikan dengan besar rencana anggaran Perusahaan>*
 Sumber Dana : *<sesuaikan dengan RKAP>*

- Kajian risiko ini dibuat dalam rangka memenuhi kebijakan dan peraturan sebagai tindak lanjut dari penerapan *Governance, Risk, Compliance* dan implementasi *Four Eyes Principle* di PT PLN Nusantara Renewables.
- Kajian risiko ini diverifikasi berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemrakarsa dan data yang disampaikan dianggap benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kajian dapat berubah apabila dikemudian hari ditemukan data atau asumsi yang berbeda dengan data yang disampaikan pada analisis risiko ini.

<kota, dd-mm-yyyy>

Pemrakarsa, <i><jabatan manajer bidang/ satuan pengusul></i>	Kepala Satuan Manajemen Risiko, Pengawasan Internal, dan Kinerja	Diperiksa Oleh, Sekretaris Perusahaan	Manajer Hukum	<i><Manajer Bidang lain, apabila diperlukan></i>
---	--	--	---------------	--

<nama>
<nama>
<nama>
<nama>
<nama>

Disetujui Oleh, Direktur *<Pemrakarsa>*
Disetujui Oleh, Direktur *<Selain Pemrakarsa>*

<nama>
<nama>

- Apabila pengusul dan pemrakarsa berasal dari Divisi/Bidang yang sama maka Pemrakarsa merupakan pejabat 1 tingkat dibawah Pengusul.

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Kajian Risiko	Halaman : 2 dari 7

1.1 Latar Belakang

<identifikasi hal-hal yang mendasari kegiatan atau kronologis peristiwa yang mendasari dilakukannya kegiatan>

Surat atau dokumen atau keputusan RUPS atau peraturan lainnya yang menjadi acuan penandatanganan SHA, (bisa lihat dari DMR)

.....

.....

.....

<identifikasi masalah awal, kenapa kegiatan ini harus dilakukan – dimana kegiatan ini sebagai mitigasi dari risiko/ masalah tersebut>

1.2 Kajian Operasional (Apabila dibutuhkan)


<sampaikan informasi tahapan, atau rangkaian operasi/pelaksanaan terkait kegiatan yang dilakukan, apabila diperlukan>

1. Informasi umum proyek termasuk pihak yang menandatangani SHA,
2. Deviasi dalam bentuk tabel antara SHA termsheet dan hasil negosiasi, di akhir kolom ada informasi keterangan tambahan :

- a. Para pihak
- b. Komposisi kepemilikan saham
- c. Kewajiban pemegang saham
- d. Biaya proyek
- e. Utang senior dan komitmen ekuitas
- f. SHL
- g. COR
- h. EPC contractor
- i. OM contractor
- j. Land procurement
- k. Reimbursement cost
- l. Joint control periode
- m. BOD
- n. BOC
- o. RUPS
- p. Reserve matters
- q. Deadlock
- r. Reps and warranties
- s. Transfer restrictions
- t. Amdal and other obligation
- u. Settlement of dispute
- v.

1.3 Kajian Finansial

<sampaikan sisi keuangan, anggaran, dan/atau pendanaan yang diperlukan terkait kegiatan yang akan dilakukan, dan evaluasi kelayakannya terhadap sasaran kegiatan yang ingin dicapai>

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Kajian Risiko	Halaman : 3 dari 7

1. Sama dengan DMR (lebih simple) dengan tambahan ketentuan nilai TMD di SHA

1.4 Kajian Kepatuhan

<sampaikan dasar hukum/regulasi atas kegiatan yang dilakukan dan persyaratan dokumentasi yang harus dipatuhi oleh Perusahaan dan tindak lanjut yang akan dilakukan>

Isu hukum

1. Dasar hukum pengembangan proyek
2. Dasar dasar aksi korporasi penandatanganan SHA

1.5 Penjabaran Sasaran

<summary dari specific + measurable + achievable + relevant + time bound>

.....

.....

.....

.....

1.6 Uji Sasaran SMART

Berikut Uji SMART untuk sasaran di atas.

Specific	<i><sasaran specific kegiatan, hal yang ingin dicapai></i>
Measurable	<i><ukuran/parameter keberhasilannya/indikator dan nilai target></i>
Achievable	<i><bagaimana cara untuk mencapai></i>
Relevant	<i><alignment dengan sasaran sasaran korporat (RJP/RKAP)></i>
Time Bound	<i><jangka waktu pencapaian></i>

1.7 Konteks/issue/scope yang digunakan:

Pada kajian risiko ini, terdapat beberapa risiko yang teridentifikasi dan berpotensi muncul sehingga dapat menghambat dalam pencapaian sasaran di atas. Berikut merupakan konteks dari setiap risiko yang muncul pada kajian risiko.

<tidak perlu seimbang antara external dan internal>

No	Konteks/Issue Internal
1	<i><untuk diisikan kondisi internal (dimana PLN NR ikut andil/terlibat) yang sudah/saat ini terjadi dan menimbulkan potensi risiko terhadap sasaran kegiatan proyek, sebagai contoh : SK Penugasan Proyek, SHA,etc></i>
2	
dst	
No	Konteks/ Issue External
1	<i><untuk diisikan kondisi eksternal (dimana PLN NR tidak ikut andil/terlibat) yang sudah/saat ini terjadi dan menimbulkan potensi risiko terhadap sasaran kegiatan proyek, sebagai contoh : Perubahan Peraturan TKDN, adanya restrukturisasi PLN Holding,etc></i>
2	
dst	

1.8 Identifikasi Risiko

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, *<nama program>* memiliki risiko sebagai berikut:

h

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Kajian Risiko	Halaman : 4 dari 7

No	Taksonomi Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak
1			Controllable: 1. <penyebab dimana PLN NR ikut andil> Uncontrollable: 1. <penyebab dimana PLN NR tidak ikut andil/eksternal>	
2				
Dst				

<taksonomi risiko berdasarkan pedoman manajemen risiko PLN NR di Bab Lampiran>

1.9 Analisis dan Evaluasi Risiko

.....

No	Statement Risiko	Inherent Risk	Residual Risk
1	<risiko> karena <penyebab> sehingga <dampak>		
2			
dst			

Tingkat Kemungkinan	Sangat Besar 5	E	Moderat	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Besar 4	D	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Sedang 3	C	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
	Kecil 2	B	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
	Sangat Kecil 1	A	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi
			1	2	3	4	5

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Kajian Risiko	Halaman : 5 dari 7

1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Medium	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Tingkat Dampak				

Keterangan

Controlled Risk
 Targeted Residual Risk

1.10 Rencana Pengendalian Risiko

<prolog jika ada catatan khusus yang akan disampaikan>
<kegiatan yang bersifat pengendalian adalah kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan, dan ada referensi dokumen seperti SOP, pedoman, proses bisnis, IK, atau ketentuan lain yang sudah ditetapkan>

.....

.....

.....

.....

No	Statement Risiko	Pengendalian/ Kontrol	Referensi Dokumen	Periode Kontrol	PIC
1	<risiko> karena <penyebab> sehingga <dampak>		Merujuk pada regulasi prosedur yang berlaku		
2					
dst					

1.11 Rencana Mitigasi Risiko

<prolog jika ada catatan khusus yang akan disampaikan>
<kegiatan yang bersifat mitigasi adalah kegiatan yang belum dilaksanakan/ belum rutin dilaksanakan, dan belum ada referensi dokumen seperti SOP, pedoman, proses bisnis, IK, atau ketentuan lain yang sudah ditetapkan>

.....

.....

.....

.....

No	Statement Risiko	Mitigasi	Due Date	PIC
1	<risiko> karena <penyebab> sehingga <dampak>		<spesifikasikan due date dengan tanggal/ bulan/ TW>	
2				
dst				

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Kajian Risiko	Halaman : 6 dari 7

<jika ada catatan khusus yang akan disampaikan>

.....

.....

.....


.....

1.12 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asumsi-asumsi tersebut masih relevan dalam situasi dan kondisi yang ada.

Berdasarkan hasil Kajian Finansial dapat disimpulkan bahwa.....

Berdasarkan hasil Kajian Risiko dari kegiatan yang dipilih memperlihatkan bahwa terdapat **<jumlah total>** Risiko dengan rincian **<jumlah>** Risiko ekstrem **<jumlah>** Risiko tinggi **<jumlah>** Risiko moderat **<jumlah>** Risiko rendah. Namun apabila pengendalian/kontrol dilaksanakan secara konsisten dan rencana mitigasi dilakukan secara efektif, diharapkan tingkat risiko-risiko tersebut dapat turun hingga *risk appetite* yang telah ditentukan

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Kajian Risiko	Halaman : 7 dan 7

LAMPIRAN DATA PENDUKUNG

Direktur Utama

HARJONO

LAMPIRAN V

10

PERATURAN DIREKSI PLN
NUSANTARA RENEWABLES
NOMOR 004.K/020/DIR-
PLNNR/II/2024
TENTANG PEMBARUAN ATAS
PROSEDUR PENERAPAN
PRINSIP GOVERNANCE, RISK
MANAGEMENT DAN
COMPLIANCE (GRC)

KERANGKA DOKUMEN ANALISIS RISIKO



	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Analisis Risiko	Halaman : 1 dari 3

LEMBAR PENGESAHAN ANALISIS RISIKO

Nomor : *<untuk ditanyakan kepada SMRPIK untuk monitoring penomoran>*
 Nama Program : *<samakan dengan judul kegiatan>*
 Sasaran/KPI : *<samakan dengan penjabaran sasaran melalui SMART>*
 Estimasi Biaya : *<sesuaikan dengan besar rencana anggaran Perusahaan>*
 Sumber Dana : *<sesuaikan dengan RKAP>*

- Analisis risiko ini dibuat dalam rangka memenuhi kebijakan dan peraturan sebagai tindak lanjut dari penerapan *Governance, Risk, Compliance* dan implementasi *Four Eyes Principle* di PT PLN Nusantara Renewables.
- Analisis risiko ini diverifikasi berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemrakarsa dan data yang disampaikan dianggap benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kajian dapat berubah apabila dikemudian hari ditemukan data atau asumsi yang berbeda dengan data yang disampaikan pada analisis risiko ini.

<kota, dd-mm-yyyy>

Pemrakarsa,
<jabatan manajer bidang/ satuan pengusul>

Diperiksa Oleh,
Pengulas I^{*)}

Diperiksa Oleh,
Pengulas II^{**)}

<nama>

<nama>

<nama>

Disetujui Oleh,
Direktur *<Pemrakarsa>*

Disetujui Oleh,
Direktur *<Selain Pemrakarsa>*

<nama>

<nama>

- *) Pengulas 1 dapat merupakan pengulas dari KSMRPIK/Sekper/Manajer Bidang lain yang terkait sesuai dengan ketentuan implementasi 4EP/ pembagian wewenang di PLN NR.
- **) Pengulas 2 opsional apabila diperlukan maka pengulas dapat dari manajer bidang lain yang terkait sesuai dengan ketentuan implementasi 4EP/ pembagian kewenangan di PLN NR.
- Apabila pengulas dan pemrakarsa berasal dari Divisi/Bidang yang sama maka Pemrakarsa merupakan pejabat 1 tingkat dibawah Pengulas

 PT PLN NUSANTARA RENEWABLES PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM FORMULIR Analisis Risiko	No Dokumen : FM11.1.1.2
	Revisi : 00
	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Halaman : 2 dari 3

ANALISIS RISIKO
(Nama Program)

Sasaran dari Program ini adalah <summary dari specific + measurable + achievable + relevant + time bound>


Specific	<sasaran specific kegiatan, hal yang ingin dicapai>
Measurable	<ukuran/parameter keberhasilannya/indikator dan nilai target>
Achievable	<bagaimana cara untuk mencapai>
Relevant	<alignment dengan sasaran sasaran korporat (RIPP/RIKAP)>
Time Bound	<jangka waktu pencapaian>

<prolog jika ada catatan khusus yang akan disampaikan>

<kegiatan yang bersifat mitigasi adalah kegiatan yang belum dilaksanakan/ belum rutin dilaksanakan, dan belum ada referensi dokumen seperti SOP, pedoman, proses bisnis, IK, atau ketentuan lain yang sudah ditetapkan>

No	Identifikasi Risiko				Level Risiko Pasca Control	Mitigasi	Level Risiko Residual
	Risiko	Penyebab	Justifikasi Dampak	Justifikasi Kemungkinan			
1	<risiko karena penyebab sehingga dampak>	Controllable: 1. <penyebab dimana PLN NR ikut andil> Uncontrollable: 1. <penyebab dimana PLN NR tidak ikut andil/eksternal>	<uraian justifikasi dampak mengacu pada Lampiran Pedoman Manajemen Risiko>	<uraian justifikasi dampak mengacu pada Lampiran Pedoman Manajemen Risiko>			
2							
<dst>							

Seluruh risiko diatas dapat ditangani apabila pengendalian kontrol dapat dilakukan secara konsisten dan mitigasi dilakukan secara efektif diharapkan tingkat risiko tersebut dapat turun sesuai *risk appetite* yang telah ditentukan.

	PT PLN NUSANTARA RENEWABLES	No Dokumen : FM11.1.1.2
	PLN NR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 00
	FORMULIR	Tanggal Terbit : Februari 2024
	Analisis Risiko	Halaman : 3 dari 3

LAMPIRAN DATA PENDUKUNG

Direktur Utama

HARJONO

10

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DIREKSI PLN
 NUSANTARA RENEWABLES
 NOMOR 004.K/020/DIR-
 PLNNR/II/2024
 TENTANG PEMBARUAN ATAS
 PROSEDUR PENERAPAN
 PRINSIP GOVERNANCE, RISK
 MANAGEMENT DAN
 COMPLIANCE (GRC)

KERANGKA LEMBAR DASAR KEPUTUSAN



LEMBAR DASAR KEPUTUSAN DIREKSI

Pemrakarsa : _____
 Judul Aksi Korporasi : _____

Kelengkapan Dokumen Pendukung

No	Judul Dokumen	Ringkasan Isi

Jakarta, (tanggal - bulan - tahun)

Pemrakarsa

 (nama Pemrakarsa)
 Tim Pengulas

 Retho Adhi Mergasari
 Kepala Satuan Manajemen
 Risiko, Pengawasan Internal dan
 Kinerja

 Susilana Candra L. S.
 Sekretaris Perusahaan

 Irene Diana Putri
 Manajer Hukum

Direktur Utama

HARJONO